

**FLYPAPER EFFECT LOCAL INCOME AND BLOCK GRANT
TO LOCAL EXPENDITURE AND INCOME
IN KUPANG CITY EAST-SOUTH EAST NUSA PROVINCE**

Esteria Nivianny Zacharias¹, dan Rossy Lambelanova²

¹ PNSD Kota Kupang

² Dosen Pascasarjana IPDN

Email : Esteriazacharias@gmail.com

Abstract

Central government financial transferred by balance allocation funds have function to decrease fiscal imbalance and produce equalization regional funds. However, this policy in fact makes most of local governments, including Kupang City government, be depended on that funds especially General Allocation Funds, because of local government ability lack. These are some purposes of this research. First, this research purposes to know how far the locally generated income and general allocation funds give effect in significant to regional expenditure partially and simultaneously. Second, it purposes to know if there was a flypaper effect in Kupang City from 2008 to 2017. Finally, this research makes an analysis of basic principles to increase regional income in order to decrease dependency to central government. This result research shows locally generated income and general allocation funds have effect to regional expenditure of Kupang City in significant from 2008 to 2017. It is because the T statistic (T count) bigger than T chart, $\alpha = 1\%$. The locally generated funds is 2,617 and the general allocation funds 4,646. In simultaneous, locally generated income and general allocation fund also give effect to regional expenditure significantly because of the F statistic bigger than F chart $\alpha = 1\%$. It is 154,061. This research also gets result that there was a flypaper effect, because the coefficient of general allocation fund bigger than locally generated income, it is $0,645 > 0,365$. Flypaper effect happened to Kupang City government can be overcome by regional income increasing. The regional income increasing can be done by expansion of income base, income leakage control, and the increasing efficiency of tax administration.

Keywords : Flypaper Effect, Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, and Regional Expenditure.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah bagi kabupaten/kota, sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi dalam sistem Pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Otonomi kepada daerah diberikan dalam bentuk kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan dan kegembiraan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menyambut otonomi daerah dengan rasa



khawatir. Menurut Tjandara (2013) suatu negara yang mendesentralisasikan tanggung jawab pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan akan turun. Sebaliknya jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan, mobilisasi dana daerah dapat menurun dan muncul ketidakseimbangan makroekonomi.

Kaho (2010:138) mengatakan bahwa “Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah dalam arti sampai seberapa jauh daerah menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus menggantungkan diri pada dana transfer dan subsidi dari pemerintah pusat.

Salah satu fenomena yang mencolok dari otonomi daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Persoalan kemandirian pemerintah daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan daerah untuk pelayanan publik, sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah tidak mencukupi, sehingga terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat terhadap pembiayaan dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal.

Selanjutnya dalam kajian Pengeluaran Publik Indonesia, World Bank (2007) menegaskan bahwa kesenjangan fiskal antar daerah yang terjadi di Indonesia karena adanya keanekaragaman dan persebaran wilayah yang sangat luas, sehingga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Transfer dari pemerintah pusat dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang diaokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) dan alokasi dasar. Keseluruhan DAU



ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri netto. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. Dana Alokasi Umum dibutuhkan juga karena tidak semua daerah dapat menutup kebutuhan belanja daerah hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya adalah semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja daerah paling besar 20% (duapuluh persen). Permasalahan yang muncul akibat ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer dari pemerintah pusat tersebut memicu terjadinya fenomena *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah. *Flypaper Effect* merupakan suatu fenomena dimana pemerintah daerah lebih merespon belanja daerah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat daripada menggunakan kemampuannya sendiri dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (Maimunah : 2006). Pemerintah Kota Kupang dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga masih didominasi oleh DAU, dimana hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kontribusi DAU dan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2016

Tahun Anggaran	DAU terhadap Pendapatan Daerah (%)	PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
1	2	3
2013	64,7	9.00
2014	62.1	11.0
2015	61.1	14.0
2016	58.0	14.0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Kupang masih relatif rendah dibandingkan dengan kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini, menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Kupang sebagian besarnya bersumber dari transfer DAU. Serta belum dapat dikatakan mandiri dan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam bentuk transfer DAU menggambarkan bahwa daerah belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan di daerahnya dan ditandai dengan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk



meningkatkan anggaran belanjanya agar pada periode berikutnya Dana Alokasi Umum diperoleh tetap pada porsi nominalnya atau bahkan meningkat. Kenyataan inilah yang menurut Gramlich dalam kuncoro (2007) menyatakan bahwa dalam kasus keuangan daerah ada respon yang tidak simetri terhadap perubahan besaran transfer pada pemerintah daerah. Untuk melihat indikasi inefisien pada pemerintah daerah tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *flypapper effect*. Respon disini merupakan suatu tanggapan langsung dari pemerintah daerah dalam menyikapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang diwujudkan pada APBD. Berbagai fenomena dilapangan tersebut dapat disusun dalam pertanyaan penelitian (*Research Question*) sebagai berikut : seberapa besar pengaruh PAD terhadap belanja daerah pemerintah Kota Kupang, seberapa besar pengaruh DAU terhadap belanja daerah pemerintah Kota Kupang, seberapa besar pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah pemerintah Kota Kupang, Apakah terjadi *flypaper effect* dan faktor apa yang dapat menjadi prinsip dasar peningkatan penerimaan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan *dominant-less dominant* yang *dominant* dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell (2010:5) “penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif”. Dengan metode yang digunakan statistik deskriptif, Sugiyono (2017) menyatakan Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel *dependen* dan variabel *independen*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2). Sedangkan variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari dokumentasi, studi pustaka dan wawancara terhadap 6 orang informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kota Kupang, dengan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang pada tahun 2008-2017. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui data primer dan data sekunder dengan jenis data *time series* yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah dan Bappeda Kota Kupang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Multiple Linier Regression Model*) dengan menggunakan model ekonometrika dengan bantuan program SPSS versi 25.0. Bentuk persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$



Keterangan :

Y = Belanja Daerah

α = intersep

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X₁ = Dana Alokasi Umum

X₂ = Pendapatan Asli Daerah

e = Error/ kesalahan

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, data terlebih dahulu diuji layak untuk digunakan atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan tujuan agar data yang dihasilkan dalam model ini tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Jika asumsi dianggar maka uji statistic menjadi tidak valid dan statistik parametric tidak dapat digunakan. Uji normalitas menggunakan uji statistic *one sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang melihat nilai signifikansi normalitas residual. Besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini adalah 0,409 dan signifikansinya pada 0,200 lebih besar dari nilai signifikansi $\alpha=0,05$. Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

Menurut Ghozali (2013 :105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolineritas menggunakan perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Dapat dilihat hasil nilai *tolerance* PAD dan DAU adalah sebesar 0,164 di atas 0,10 dan nilai VIF sebesar 6,082 dibawah 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Menurut Ghozali (2013 :139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedestisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan uji Glesjer. Berdasarkan Uji Glejser tampak bahwa data terbebas dari hetorekedastisitas karena *p-value* (probabilitas signifikansi) dari masing-masing variabel independen yaitu 0,908 dan 0,780 > tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).

Menurut Ghozali (2013 :110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson (D-W)*. Berdasarkan Perhitungan *Durbin-Watson* menghasilkan nilai D-W sebesar 1,945. Hal ini menunjukkan bahwa nilai D-W masih berada diantara 1,6413 dan 2,3587. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik negatif maupun positif.



Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, maka perlu digunakan analisa melalui uji koefisien determinasi, uji t dan Uji F. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kota Kupang secara parsial. Menurut Kuncoro (2011:108) koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji signifikan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kota Kupang secara simultan.

Penentuan *flypaper effect* dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Gorodnichenko dalam Kuncoro (2007), yang membagi fenomena flypaper effect kedalam dua versi yaitu, versi pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan dan versi yang kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Maimunah (2006 : 30) mengemukakan syarat terjadi *flypaper effect* adalah 1.) apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau 2.) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk model regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 25.0. Berikut ini adalah hasil pengujian :

Tabel. 2 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12236303694.472	86501515512.275		.141	.891
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.503	.574	.364	2.617	.035
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.261	.271	.645	4.646	.002

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan hasil tersebut maka disusunlah model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 12.236.303.694.472 + 0,364 X_1 + 0,645 X_2 + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna :

1. Nilai konstanta sebesar 12.236.303.694.472 artinya apabila PAD dan DAU bernilai nol maka Belanja Daerah sebesar 12.236.303.694.472.



2. Setiap peningkatan 1 % PAD maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,364 % dengan asumsi DAU bernilai konstan atau tidak mengalami perubahan.
3. Setiap peningkatan 1% DAU maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,645% dengan asumsi PAD bernilai konstan atau tidak mengalami perubahan.

Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah hasil dari pengujian hipotesis :

Tabel. 3 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6664573790179413 00000000	2	333228689508 970650000000	154.061	.000 ^b
	Residual	1514080310140344 0000000.000	7	216297187162 9063000000		
	Total	6815981821193448 00000000	9			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan uji Anova atau F test pada tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 154,061 sedangkan nilai Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan ($df_1=2$; $df_2 = 7$) adalah 4,74. Hal ini berarti bahwa nilai Fhitung > Ftabel ($154,061 > 4,74$). Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah atau dapat dikatakan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Tabel.4 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.989 ^a	.978	.971	46507761412.790

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel di atas menunjukkan besarnya R^2 adalah 0.978, hal ini berarti 97,8% belanja daerah merupakan kontribusi dari PAD dan DAU, sedangkan sisanya 2,2 % merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti atau tidak ada dalam model.

Tabel.5 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12236303694.472	86501515512.275		.141	.891



Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.503	.574	.364	2.617	.035
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.261	.271	.645	4.646	.002

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai thitung PAD adalah sebesar 2.617 dan nilai sinifikannya sebesar 0,035 sedangkan nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan ($df=7$) adalah sebesar 2.365. Hal ini berarti bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,617 > 2,365$), maka PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk nilai thitung DAU adalah 4.646. Hal ini berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,646 > 2,365$), maka pengaruh DAU juga signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Kupang

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan daerah dalam wilayah yuridiksnya yang diakui sebagai penambah nilai dalam 1 tahun anggaran dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung anggaran belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan daerah yang setiap tahunnya meningkat. Menurut Djaenuri (2012 : 88) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PAD Kota Kupang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Kupang, dengan hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,617 > 2,365$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansinya ($0,035 < 0,05$). Artinya semakin besar PAD maka Belanja Daerah akan semakin besar pula dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima . Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan bahwa dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan yang sama, yaitu jika PAD meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dala menentukan belanja daerah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:18) Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Kupang

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang tujuan diberikannya dana ini adalah untuk pemerataan kemampuan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebutuhan akan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan juga potensi daerah (UU No. 33 Tahun 2004). DAU ini juga diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan



otonomi daerah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Dalam penelitian ditemukan bahwa DAU pada Pemerintah Daerah Kota Kupang memiliki pengaruh yang signifikan dan cukup dominan terhadap Belanja Daerah Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh thitung sebesar 4,646 dengan nilai signifikansi 0,002. Dengan demikian $t_{hitung} (4,646) > t_{tabel} (2,365)$ atau nilai signifikansi $(0,002) < \alpha (0,05)$, yang berarti bahwa besar kecilnya DAU akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap besaran Belanja Daerah Kota Kupang. Sehingga semakin DAU maka semakin tinggi juga Belanja Daerah Kota Kupang dan sebaliknya. Dengan demikian Hipotesis kedua yaitu DAU berpengaruh terhadap signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Kupang dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan bahwa peningkatan besaran DAU setiap tahunnya juga diikuti dengan peningkatan besaran Belanja Daerah Kota Kupang. Hasil ini memperkuat teori penyusunan anggaran bersifat incrementalism, alokasi anggaran belanja daerah akan menyesuaikan dengan bertambah/berkurang jumlah anggaran pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan celah fiskal inilah yang akan ditutup dengan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat dari Tjandra (2013:142) Semangat transfer DAU terjadi lantaran pemerintah daerah memang membutuhkan pendanaan pemerintah pusat. Sayangnya, hal tersebut menimbulkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah pusat. Ketergantungan pendapatan itu sendiri muncul lantaran besarnya kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya tidak berbanding lurus dengan kewenangannya dalam mengelola sektor fiskalnya.

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Kota Kupang secara Simultan

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, menurut Mardiasmo (2002 : 46).

Hasil yang diperoleh Fhitung sebesar 154,061 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai Ftabel dari tabel statistik yaitu tabel F dengan $df1 = 2$, $df2 = 7$ dan alpha 5% (0,05) diperoleh nilai Ftabel sebesar 4,74. Dengan demikian, diketahui $F_{hitung} (154,061) > F_{tabel} (4,46)$ dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 3 dapat diterima yaitu PAD dan DAU berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah Kota Kupang. Yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang didapat daerah maka semakin tinggi belanja daerah yang dikeluarkan. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R^2 0,978. Artinya 97,8% Belanja Daerah Kota



Kupang dipengaruhi oleh PAD dan DAU dan sisanya 2,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil ini menunjukkan kontribusi pengaruh yang sangat besar pada belanja daerah yang terlihat dari nilai R^2 yang mendekati angka 1. Hal tersebut juga membuktikan bahwa hampir sebagian besaran anggaran belanja daerah Kota Kupang bersumber dari PAD dan DAU. Sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002:135) Sumber-sumber pokok keuangan daerah terdiri dari PAD dan Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK.

Menentukan *Flypaper Effect*

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer dalam hal ini DAU daripada menggunakan dana sendiri atau PAD. Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah maka harus dibandingkan koefisien PAD dan koefisien DAU.

Berdasarkan analisis yang diperoleh nilai koefisien PAD sebesar 0,364 dan nilai koefisien DAU sebesar 0,645, maka diperoleh hasil bahwa nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD ($0,645 > 0,364$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada belanja daerah pemerintah Kota Kupang terjadi *flypaper effect* pada tahun 2008-2017. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kupang memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU. Hal ini terlihat dari semakin banyak DAU yang dari seluruh pendapatan Kota Kupang dan perkembangan PAD yang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan besaran alokasi DAU yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *flypaper effect* dapat membawa dampak peningkatan belanja daerah lebih besar daripada alokasi DAU dari pemerintah pusat serta kecenderungan pemerintah daerah menanti bantuan dari pemerintah pusat daripada mengelola sumber daya sendiri. Hal tersebut senada dengan pendapat Afrizawat (2012) adanya implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah, yaitu menyebabkan celah kepincangan fiskal akan tetap ada, menimbulkan ketidakmaslilan dalam menggali potensi daerah, menyebabkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tetap ada dan adanya respon yang berlebihan dalam menggunakan dana transfer.

Faktor-Faktor yang menjadi Prinsip Dasar dalam Peningkatan Penerimaan Daerah untuk Mengatasi *Flypaper Effect*

Untuk mengatasi terjadinya *flypaper effect* pada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Kupang, maka ada beberapa faktor yang menjadi prinsip peningkatan penerimaan daerah yang perlu diterapkan.

1. Perluasan Basis Penerimaan

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan menggali potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan dan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun



perbaikan adminstrasinya. Menurut (Mardiasmo, 2010) dalam memperluas basis penerimaan pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara :

- a. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi baru;
- b. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi;
- c. Meningkatkan basis data dan objek pajak/retribusi;
- d. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi .

Dari hasil wawancara dengan informan dan disesuaikan dengan teori perluasan basis penerimaan tersebut maka diperoleh beberapa upaya untuk dapat meningkatkan basis penerimaan, yaitu :

- a) Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pengelolaan pendapatan.
- b) Menciptakan iklim investasi.
- c) Melakukan Penilaian Kembali atas pajak dan retribusi daerah.

2. Pengendalian Kebocoran Pendapatan

Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar atau korupsi petugas. Menurut (Mahmudi :2010) untuk mengatasi kebocoran pendapatan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan audit baik rutin maupun insidental;
- b. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah;
- c. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhi;
- d. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.

Kebocoran pendapatan merupakan suatu permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah daerah secara khusus karena dengan terjadinya kebocoran pendapatan maka ada beberapa program dan kegiatan dalam membangun daerah yang tidak dapat dilakukan secara maksimal dan pemerintah daerah juga akan semakin tergantung pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dari hasil wawancara dilapangan dan dikaitkan dengan teori yang ada, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu :

- a) Penyempurnaan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah.
- b) Optimalisasi penggunaan anggaran secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.
- c) Memperketat sistem pengawasan dan pengendalian internal.
- d) Memberikan *reward* dan *panishmen* bagi wajib pajak/retribusi.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak

Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian



daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di sejumlah negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya. Beragam langkah ditempuh untuk mewujudkan perolehan penerimaan yang cukup substansial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diemban oleh pemerintah daerah otonom. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah otonom adalah meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan jalan secara terus menerus menyempurnakan administrasi pendapatan daerahnya. Menurut Mardiasmo (2002) untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan yang memadai, maka pemda dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar.

Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah menyangkut dengan melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah. Hal ini ditujukan agar para wajib pajak daerah dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi dan pemungutan; mengembangkan sistem valuasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya. Mahmudi (2010) mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisien administrasi pajak, yaitu:

- a. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga mudah dan sederhana.
- b. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan.
- c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori yang ada, maka untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan efisiensi administrasi pajak dapat dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan identifikasi terhadap data wajib pajak.
- b) Memperbaiki sistem prosedur administrasi pajak.
- c) Menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam mempermudah dan memberikan kenyamanan pada wajib pajak.

PENUTUPAN

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kota Kupang berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Kupang baik secara parsial maupun secara simultan dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 97,8% dan masing-masing besarnya pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja Daerah Kota Kupang adalah 2.365 dan 4,646. Dari hasil analisis *Flypaper Effect* maka dapat dikatakan disimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja Daerah Kota Kupang. Hal ini, dibuktikan dengan nilai koefisien PAD terhadap belanja daerah sebesar 0,365 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisien DAU terhadap



Belanja Daerah sebesar 0,645. Faktor-Faktor yang menjadi prinsip dasar untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam mengatasi terjadinya *flypaper effect* yaitu, perluasan basis penerimaan, pengendalian kebocoran pendapatan dan peningkatan efisiensi administrasi pajak.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, maka pemerintah Kota Kupang perlu melakukan beberapa hal berikut ini.

1. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memprioritaskan anggaran untuk belanja daerah yang produktif dan efisien (belanja modal) seperti membangun infrastruktur, agar dapat memberikan *output*, *outcome* dan *multiflier effect* yang nyata dirasakan dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat Kota Kupang sehingga dari perkembangan perekonomian daerah yang baik akan secara otomatis berdampak pada peningkatan PAD.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menciptakan iklim investasi yang didukung dengan pelayanan perijinan yang cepat, murah, mudah, terjangkau dan transparan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru
3. Dalam rangka mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Kupang terhadap Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat. Ada beberapa alternative saran yang dapat disaran untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, antara lain: Melakukan pembenahan manajemen pengeluaran daerah antara lain dengan melakukan penghematan, Melakukan pembenahan manajemen penerimaan daerah agar pertumbuhan PAD yang diinginkan dapat melebihi target setiap tahunnya dan Pemerintah Kota Kupang harus menggali potensi daerah yang ada yaitu dengan cara, memaksimalkan peningkatan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang masih belum maksimal.
4. Menerapkan prinsip dasar untuk membangun manajemen penerimaan daerah sehingga dapat mengatasi terjadinya *flypaper effect*

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Dokumen RPJMD Kota Kupang Periode 2017-2022.
- Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Periode 2017-2018.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gorodnichenko, Y. 2001. *Effect Of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior Of Local Government*. The Case Of Ukraine, Master Thesis, University Of Kiev.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Universitas Diponegoro.



- _____.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*.
Semarang : Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Kausalitas antara Penerimaan, Belanja dan PDRB pada Kota dan Kabupaten di Indonesia*.*Jurnal ekonomi Pembangunan : Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Hal. :195-211.
- Kuncoro, Mudrajad .2011. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2008-2018.
Kota Kupang Dalam Angka Tahun 2018.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Riwu Kaho, Josef. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Tjandra Riawan, 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Grasindo
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Website Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri.

